

**ANALISIS OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET DAERAH PADA
PEMERINTAHAN KABUPATEN NAGEKEO**

(Studi Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Nagekeo)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Manajemen



OLEH:

SEBASTIANA LILI

NIM : 2017120156

FAKULTAS EKONOMI

PROGRAM STUDI MANAJEMEN

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI

MALANG

2021

RINGKASAN

Dengan adanya pengelolaan aset yang baik merupakan kunci yang paling sukses dalam perekonomian khususnya di daerah. Sangat penting dalam pengelolaan aset atau harta karena ini didasari dengan prinsip yang paling penting yaitu pengelolaan potensi dari berbagai daerah untuk bisa digunakan dalam membiayai semua kegiatan daerah tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Dalam mengumpulkan data tersebut menggunakan observasi, wawancara, studi pustaka, dokumentasi, triangulasi dan internet searching. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian serta mengkajinya dengan kajian pustaka yang telah ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset pada pemerintahan kabupaten nagekeo secara keseluruhan sudah maksimal dan sesuai dengan siklus pengelolaan barang yang diatur PERMENDAGRI No. 19 tahun 2016. Meskipun semua belum terlaksana secara optimal seperti keterlambatan laporan keuangan atau tidak ada laporan keuangan hanya mengadakan berita acara mengenai laporan keuangan .faktor penghambat dalam siklus pengelolaan barang milik daerah kabupaten nagekeo adalah, perencanaan, pengadaan dan penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pemeliharaan, inventarisasi dan pengawasan.

Kata kunci: Optimalisasi, Pengelolaan Aset.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 latar belakang

Negara Indonesia di masa sekarang ini, sangat memberikan kesempatan ataupun keleluasan kepada pemerintah daerah untuk menjalankan otonomi daerah. Menurut UU No.22 tahun 1999 bahwa desentralisasi bisa diartikan pemberian tugas dari pemerintah kepada pihak daerah otonom yang dijalankan sesuai dengan peraturan pemerintahan republik Indonesia, sedangkan arti dari otonomi daerah itu sendiri merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk mengurus dan mengawasi masyarakat setempat sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan semua masukan dari masyarakat yang telah ditulis dalam undang-undang. Daerah otonom biasanya menjalani kegiatan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah pusat memberi tanggung jawab kepada pemerintah daerah yang meliputi kabupaten desa agar bisa mengatur dan mengkoordinasikan semua masyarakat agar bisa sejahtera dan bisa maju karena dengan peran otonomi daerah masyarakat bisa merasakan kesejahteraan. Dengan adanya otonomi diharapkan pemerintah daerah bisa lebih bekerja secara mandiri dalam menjalankan semua tugas yang diberikan dari pemerintah pusat. Tugas dari pemerintah pusat hanya menegaskan dan mengawasi untuk melakukan perubahan dalam daerah masing-masing. Yang paling penting pemerintah daerah harus lebih jeli dalam menilai potensi yang ada dalam daerah tersebut khususnya bagian pengelolaan yang berkaitan dengan investasi daerah. Dengan cara memperhatikan dan selalu melakukan evaluasi kegiatan dan melihat kinerja semua karyawan yang mendukung kegiatan atau aktivitas yang dijalankan (M. Askianto:2018). Maka dari itu harus adanya kegiatan yang nyata kata-kata gak bisa merasakan

pemerataan dalam pengelolaan dan pemanfaatan semua harta daerah yang bisa digunakan masa mendatang.

Arti dari manajemen aset itu sendiri merupakan proses pengelolaan harta atau aset yang berupa wujud dan tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi sangat besar, nilai komersial, nilai tukar yang besar, serba bisa mendukung tujuan. Secara umum, siklus yang berkaitan dengan pengelolaan aset tidak bisa dilewati dalam manajemen aset. Menurut permendagri nomor 17 tahun (2007) tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah.

Dengan adanya pengelolaan aset yang baik merupakan kunci yang paling sukses dalam perekonomian khususnya di daerah. Sangat penting dalam pengelolaan aset atau harta karena ini didasari dengan prinsip yang paling penting yaitu pengelolaan potensi dari berbagai daerah untuk bisa digunakan dalam membiayai semua kegiatan daerah tersebut. Dalam mengelola harta yang dimiliki oleh daerah harus memiliki profesional yang tinggi dan diharapkan mampu memiliki kepercayaan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah dari semua masyarakat. Menurut M Murni, RY Susanto & RAD Susanti (2020), pengelolaan merupakan akuntabilitas yang memiliki prinsip dalam menjalankan tugas oleh perusahaan agar mencapai tujuan yang diinginkan melalui perencanaan serta pengawasan pembangunan.

Pembangunan dan pengelolaan aset daerah pada Kabupaten Nagekeo memiliki permasalahan seperti pembebasan lahan pada Kantor DPR, rumah jabatan bupati dan wakil bupati, pembangunan infrastruktur jalan raya, serta pengelolaan penggunaan pelabuhan kapal yang tidak digunakan atau tidak dimanfaatkan secara optimal, bisa disimpulkan bahwa pembangunan dan pengelolaan aset daerah yang ada di Kabupaten Nagekeo masih belum dimanfaatkan dengan baik.

Alasan mengapa peneliti memilih tema Analisis Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah dan tempatnya pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Nagekeo, karena peneliti ingin

mengetahui bagaimana pengelolaan aset daerah pada pemerintahan Nagekeo dan juga Nagekeo Merupakan Kabupaten baru sebagai pemekaran dari Kabupaten Ngada yang diresmikan pada tanggal 22 mei 2007 melalui undang-undang no.2 tahun 2007. Kabupaten Nagekeo memiliki 7 Kecamatan (Aesesa, Boawae, Mauponggo, Keo Tengah, Nangaroro, Aesesa Selatan, Wolowae). Dari permasalahan di atas, maka dari itu peneliti ingin mengkaji sesuai dengan permasalahan yang ada dengan judul “Analisis Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Nagekeo”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan aset tetap daerah pada pemerintahan kabupaten Nagekeo?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengelolaan aset tetap daerah pada pemerintahan kabupaten Nagekeo.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang baru untuk meneliti mengenai permasalahan yang berkaitan.
2. Sebagai masukan kajian terbaru yang dapat diinformasikan kepada peneliti atau pembaca di masa yang akan datang dan dapat digunakan sebagai bahan penelitian dengan objek yang berbeda.
3. Sebagai pembaharuan teori agar bisa digunakan untuk kajian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid .2013.Strategi Pembelajaran .Remaja Rosdakarya:Bandung.
- Anwar Hidayat (2012)., Besar Sampel Dalam Penelitian.
- Bungin Burhan. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Pt. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Carl S. Warren, Dkk. 2014. *Accounting Indonesia Adaptation*. Jakarta : Salemba Empat.
- Chabib Sholeh Dan Heru Rochmansjah, 2010, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. Bandung: Fokusmedia.
- Depdikbud, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Buku Satu, Jakarta: Balai Pustaka Utama
- Depdiknas .2001. Kamus Besar Bahasa Indonesia.Jakarta ;Balai Pustaka.
- Djumara, Noorsyamsa. 2007. Modul 3 Sumber Daya Alam Lingkungan Terbarukan Dan Tidak Terbarukan Diklat Teknis Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Daerah (Environmental Assesment And Management). Jakarta.
- George R. Terry Dan Leslie W. Rue.2008. Dasar-Dasar Manajemen, Bumi Aksara: Jakarata
- Gia Dewi (2019). Analisis Pengelolaan Pakjak Bumi dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang. *Jurnal riset ekonomi, akuntansi, Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang*.
- Gima Sugiana (2013). Manajemen Aset Pariwisata Bandung : Guardaya Intimarta.
- Hasfi, Nyemas, Dkk. 2013. Pengelolaan Barang Milik Daerah. (Suatu Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Sintang). *Jurnal Administrasi Negara*. Vol 1. No. 0001 Oktober 2013
- Ikatan Akuntan Indonesia (Iai).2016.Standar Akuntansi Keuangan Revisi 2016.Salemba Empat. Jakarta.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2011. Ed Psak 16 (Revisi 2011). Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta.

Kolinug, M. S., Ilat, V. I., & Pinatik, S. (2015). Analisis Pengelolaan Aset Tetap pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(1).

Koontz, Harold. Cyril O'donnell, Dan Heinz Wehrich. 2011. Manajemen. Jakarta:Erlangga

Mahmudi. 2010. Manajemen Keuangan Daerah . Jakarta: Penerbit Erlangga.

Maria Trivonia Manehat (2019). Analisa Pengaruh Pendapatan Sektor Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Di Dinas Perhubungan Dan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Malang. *Jurnal riset ekonomi, akuntansi, Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang*.

Mursyidi.2009. Akuntansi Pemerintahan Indonesia. Bandung: Refikaaditama

Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2011 tentang Pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Nagekeo

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07. 2010. Akuntansi Aset Tetap. Presiden Republik Indonesia. Jakarta

Purba, R. B. (2019). Pengelolaan Aset Tetap Daerah Dalam Mengoptimalkan Pemanfaatan Aset Daerah. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 152-164.

- Ruslan, Rosady. 2010. *Metode Penelitian : Public Relations Dan Komunikasi*. Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada.
- Saren, C. M., Morasa, J., & Wokas, H. N. (2017). Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada BPK-BMD Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(4).
- Siregar, D. D. (2004). *Manajemen Aset. Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan Secara Nasional Dalam Konteks Kepala Daerah Sebagai Ceo's Pada Era Globalisasi Dan Otonomi Daerah*. Pt. Gramedia Pustaka Utama.
- Siregar, Doli D. 2004. *Manajemen Aset*. Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama.
- Sondakh, B. Y., Sabijono, H., & Mawikere, L. (2017). Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 5(2).
- Standar Akuntansi Pemerintah .2010. Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah . Jakarta: Sekretaris Negara Ri.
- Sugiyono. (2011) . *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D*. Alfabeta
- Sugiyono. (2012) . *Memahami Penelitian Kualitatif*“. Bandung :Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitati Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukardi. 2003. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi Dan Prakteknya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Terry, George R Dan Leslie W.Rue. 2014. *Dasar-Dasar Manajemen*, Penerjemah G.A Ticoalu. Jakarta: Pt Bumi Aksara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

Wilson. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia. Erlangga. Jakarta

Yusuf, Pawit M. 2010. Komunikasi Instruksional : Teori Dan Praktek. Jakarta : Pt. Bumi
Aksara